

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Yogyakarta adalah daerah berpenduduk sebesar 3.434.534 jiwa. Mayoritas masyarakat Yogyakarta memeluk agama Islam, yakni sebesar 92.1% dari jumlah penduduk,¹ sehingga sangatlah tidak mungkin jika tidak melibatkan umat Islam dalam setiap hal dan peristiwa yang terjadi di daerah ini. Tak terkecuali dalam hal-hal yang terkait dengan permasalahan politik, atau hubungan antara umat Islam dengan pemerintah.

Sejak lama para pemimpin Islam berusaha menemukan jalan keluar dari persoalan yang membelit sebagian besar umatnya, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Sesudah lama terkungkung oleh kebijaksanaan diskriminatif penjajah, kemerdekaan memang memberi peluang umat Islam untuk mengembangkan diri. Namun sampai lebih dari lima puluh tahun sesudah proklamasi kemerdekaan, citra tentang kemiskinan dan keterbelakangan itu masih juga belum terhapus. Sebagian besar umat Islam jauh tertinggal dalam berbagai hal: pendidikan yang rendah, bidang pekerjaan yang secara materil kurang menguntungkan, skor kualitas hidup fisik yang rendah, dan status sosial ekonomi yang juga rendah.

¹ <http://www.pemda-diy.go.id>

Dari beberapa kajian yang pernah ada, partai Islam di Indonesia bisa dibedakan dari asas politiknya dan atau basis massa politiknya. Partai politik Islam di Indonesia, adalah partai yang menggunakan label Islam (nama, prinsip, dan simbol), atau tidak menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk Indonesia, tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam.

Berdasarkan definisi dan kategori yang dibuat Arsekal Salim di atas, maka yang termasuk partai Islam kategori pertama semisal PPP, PBB dan PKS. PPP menggunakan asas Islam dan memakai simbol Ka'bah yang merupakan simbol yang sakral dalam Islam. PBB dasarnya Islam dengan lambang bulan sabit dan bintang yang menjadi ciri khas Islam. Kemudian kategori kedua dan ketiga seperti PKB dan PAN. Kedua partai tersebut tidak menggunakan asas Islam dan tidak menggunakan simbol-simbol Islam namun, konstituen utamanya adalah umat Islam sehingga tidak dapat dikatakan tidak kedua partai ini adalah partai Islam.

Ketika era reformasi baru saja dimulai dengan beralihnya kepemimpinan Soeharto ke Presiden Habibie, politik Indonesia menjadi kembali bergairah dengan keluarnya keputusan Habibie untuk tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Akibat dari kebijakan ini bermunculanlah partai politik Islam yang mengusung Islam sebagai asas politik antara lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK). Munculnya partai-partai ini setidaknya memberikan angin segar bagi umat Islam,

karena sudah ada tempat untuk menampung aspirasi dan kepentingan umat. Persaingan partai-partai Islam pun tidak dapat dielakkan, tetapi hal ini merupakan motivasi bagi partai-partai tersebut untuk menjadi yang terbaik dalam menyalurkan aspirasi-aspirasi dan kepentingan masyarakat Islam.

Sejak pemilu 1999, partai-partai Islam muncul dalam jumlah yang sangat banyak dengan beragam motif dan kepentingan, mulai dari kepentingan yang bersifat pragmatis hingga cita-cita politik yang paling ideal seperti isu mendirikan negara Islam, khilafah dan lain sebagainya. Motif dan kepentingan yang tampak kuat dari berdirinya partai Islam pasca Orde Baru lebih banyak dipicu oleh euforia politik yang dominan, nafsu berkuasa, perlakuan rezim sebelumnya terhadap umat Islam dan klaim diri sebagian elite Islam sebagai tokoh yang memiliki pengikut.

Klaim memiliki basis massa tersebut pada pemilu 1999 dan 2004 tidak terbukti, pada pemilu 1999 hanya ada dua partai Islam yang lolos ambang batas minimal 2 persen suara (PPP dan PBB), demikian juga pemilu 2004 (PPP dan PKS).

D. I. Yogyakarta merupakan wilayah basis nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari pemilu 1999 yang menempatkan PDI-P di urutan pertama sebagai partai yang mampu meloloskan 15 wakilnya duduk di kursi DPRD Provinsi. Selain bangkitnya pemilih nasionalis, pada saat yang sama basis-basis konstituen partai Islam rupanya turut berkembang. Kekuatan politik Islam tampak dari menyeruaknya perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang meraih tempat kedua dengan 17,27 persen suara, mengalahkan Golkar di tempat ketiga dan PKB di tempat keempat.

Kemenangan politik PAN dengan meraih tempat kedua dalam Pemilu 1999 menandai bangkitnya kekuatan politik yang berafiliasi kepada identitas keislaman. Meski parpol ini secara platform bersifat terbuka, tak terhindarkan terbentuknya afiliasi politik yang dekat dengan simbol keislaman, terutama gerakan Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta. Malah bisa dikatakan, PAN memiliki massa riil pendukung yang dikonstruksi dan terbentuk dari jumlah massa Muhammadiyah di wilayah ini.

Dari data penelitian yang dilakukan IRI (The International Republican Institute) pada 5-14 Maret 2007 di wilayah di DIY. Penelitian ini menggunakan metode cluster random sampling dengan jumlah responden: 700 responden (*sampling error* \pm 3,8 % dengan derajat kepercayaan 95%). Dari penelitian ini di dapat data ternyata 11 % menyatakan diri berafiliasi ke ormas NU dan 16 % berafiliasi pada Muhammadiyah, 2 % ormas lainnya, dan sisanya, berarti 71 % tidak memiliki afiliasi dengan ormas manapun. Simpulannya, 71 % tidak terikat oleh ormas tertentu, sementara yang merasa terikat dengan ormas Muhammadiyah hanya 16 %. Jika penelitian benar, dari penduduk DIY yang berjumlah \pm 3.000.000 jiwa maka yang memiliki keterikatan penuh dengan Muhammadiyah hanya berjumlah 480.000 jiwa saja.²

Selama dua pemilu terakhir (1999-2004), proporsi perolehan parpol nasionalis dan Islam sebenarnya relatif tetap. Pada Pemilu 1999, pemilih parpol Islam di D. I. Yogyakarta mencakup 44 persen, sedangkan pemilih partai

² Ahmad Sumiyanto, S.E.,M.S.I. (Ketua Umum DPW PKS DIY, Periode 2006-2010) Ikhwanul Muhammadiyah: Gagal Memahami “Saudaranya Muhammadiyah” (Makalah bedah buku *Ikhwanul Muhammadiyah* DPC IMM Kab. Sleman, 2-6-2007)

nasionalis sekitar 56 persen. Komposisi ini terulang kembali dalam jumlah relatif sama pada Pemilu 2004. Artinya, pemilih nasional dan pemilih Islam relatif loyal kepada ideologi yang dianut, tetapi bisa jadi beralih kepada partai lain, asalkan ideologinya sama.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia berlambang Ka'bah yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi.³ Dilihat dari pendiriannya, partai ini sudah cukup lama dibandingkan dengan partai PKS yang dideklarasikan pada tanggal 20 April 2003 dihadapan puluhan ribu kader dan simpatisan yang sebagian besar adalah kader-kader partai keadilan.⁴ Partai PPP dan PKS merupakan partai yang sama-sama mengusung Islam sebagai asas politiknya. Partai PPP merupakan partai yang secara umur boleh dikatakan sangat matang untuk disebut partai yang penuh pengalaman dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Sungguh sangat berbeda jika kita berbicara tentang PKS, partai yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) ini kurang lebih baru berumur 10 tahun, jika dibandingkan dengan PPP yang kurang lebih berumur 38 tahun sungguh sangat terlihat perbedaan usia antara kedua partai ini. Usia yang cukup matang ini memberi PPP banyak pengalaman-pengalaman dalam panggung perpolitikan di Indonesia, hanya saja PPP belum mampu untuk bangkit dari keterpurukan dengan berbagai masalah-masalah yang hinggap ditubuhnya. Kematangan umur seharusnya sedikit banyak menguntungkan partai PPP, hal ini

³ <http://www.ppp.or.id>

⁴ www.keadilan.or.id

dikarenakan partai ini lebih banyak dikenal masyarakat. Program-program partai yang menjadi senjata dalam kampanye politik, setidaknya sudah menjadikan partai ini sangat akrab terhadap masyarakat.

Partai Keadilan merupakan salah satu partai Islam yang cukup diperhitungkan sejak berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2003. Partai Keadilan Sejahtera sangat cepat menarik simpati masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Islam secara khusus, dan partai inipun mampu bersaing dengan partai-partai Islam lainnya pada pemilu-pemilu yang diadakan di Yogyakarta.

Pemilu yang diikuti beberapa partai Islam di Indonesia pasca orde baru dilaksanakan pada tahun 1999, 2004 dan yang terakhir pada tahun 2009. Sama halnya dengan Pemilu di DIY Partai-partai Islam juga ikut ambil bagian dalam pemilu ini, setidaknya ada lima partai besar yang ikut didalamnya antara lain, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan/Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.

Dari beberapa Pemilu yang diadakan pasca orde baru, disini dapat dilihat hasil perolehan suara yang didapat oleh partai Islam diantaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di DIY pada tahun 2004 dan 2009 adalah⁵:

⁵ www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 1.1

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004 DI DIY

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	94.266
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	141.114

Tabel 1.2

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009 DI DIY

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	61.344
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	159.132

Pemilu yang dilangsungkan tahun 2009 diatas menunjukkan Partai Keadilan Sejahtera mampu mengungguli partai Persatuan Pembangunan sebagai seniornya dalam pemilu yang dilaksanakan di Yogyakarta. Sedangkan sebaliknya Partai Persatuan Pembangunan mengalami penurunan perolehan suara dari tahun ke tahun dan sebaliknya Partai Keadilan Sejahtera mampu menaikkan perolehan suara sejak berganti nama dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Puncak dari itu Partai Keadilan Sejahtera mampu mengungguli seniornya dengan perolehan suara sebesar 159.132, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan hanya mampu memperoleh suara sebesar 61.344 pada pemilu tahun 2009. Kemampuan PKS dalam mengungguli PPP pada pemilu 2009 ini setidaknya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik.

Hasil rekapitulasi suara sah yang diperoleh masing-masing calon tetap untuk DPRD Provinsi DIY, antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera terlihat sebagai berikut pada tabel dibawah ini:⁶

Tabel 1.3

**Hasil Rekapitulasi Suara Sah Calon Tetap PPP untuk
Anggota Legislatif DPRD Provinsi DIY 2009-20014**

No	DAPEL	Nama Parpol	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1.	Yogyakarta 2	PPP	2	Drs. H. Edi Susila	8891
2.	Yogyakarta 4	PPP	4	H. Muhammad Yazid, S, Ag	9363

Tabel 1.4

**Hasil Rekapitulasi Suara Sah Calon Tetap PKS untuk
Anggota Legislatif DPRD Provinsi DIY 2009-20014**

No	DAPEL	Nama Parpol	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1.	Yogyakarta 2	PKS	1	Agus Sumartono S. Si	5678
2.	Yogyakarta 2	PKS	2	Arif Rahman Hakim	5527
3.	Yogyakarta 3	PKS	1	Nur Sasminto, ST	7886

⁶ www. Kpud-diyprov. go. Id (Hasil Rekapitulasi Calon Terpilih Anggota Legislatif DPRD Provinsi DIY periode 2009-20014)

4.	Yogyakarta 4	PKS	1	Ahmad Sumiyanto, SE., M. Si	10006
5.	Yogyakarta 4	PKS	7	H. Nandar Winoro, ST	8771
6.	Yogyakarta 5	PKS	2	Ir. Arife Budiono	4768

Dari Perbandingan hasil suara sah pemilihan calon legislatif DPRD Provinsi DIY periode 2009-2014, terlihat jelas bagaimana kemampuan PKS sebagai partai baru, mampu menggungguli pendahulunya yaitu PPP. PPP hanya mampu menempatkan wakilnya sebanyak 2 orang untuk duduk di DPRD Provinsi DIY, sedangkan PKS mampu menempatkan wakilnya sebanyak 6 orang di DPRD Provinsi DIY. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, ada masalah serius yang dihadapi partai yang pernah berjaya dan menjadi satu-satunya partai yang menampung aspirasi umat Islam pada era orde baru ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi topik permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) *Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada PEMILU tahun 2009 di D. I. Yogyakarta?*
- 2) *Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada PEMILU tahun 2009 di D. I. Yogyakarta?*

C. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Permasalahan Ketidakmampuan Partai Persatuan Pembangunan dalam mengungguli perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, yang mana Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang telah berdiri lebih dahulu dibandingkan Partai Keadilan Sejahtera.
2. Melihat faktor apa saja yang mempengaruhi Ketidakmampuan Partai Persatuan Pembangunan dan kemampuan Partai Keadilan Sejahtera dalam perolehan suara pada PEMILU 2009 di D. I. Yogyakarta.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Mengingat partai politik adalah sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan dari partai politik tersebut.
2. Untuk melihat sejauh mana usaha yang dilakukan partai politik Islam (PPP dan PKS) dalam meraih simpati masyarakat pemilih di D. I. Yogyakarta pada PEMILU 2009.
3. Untuk melihat faktor penyebab ketidakmampuan Partai Persatuan Pembangunan (Partai Lama) dan kemampuan Partai Keadilan Sejahtera dalam meraih simpati masyarakat untuk mendongkrak hasil perolehan suara masing-masing partai di D.I.Yogyakarta

Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan bagi penulis baik yang bersifat teoritis maupun praktis :

- a. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa dalam memahami keunggulan dan kekurangan partai politik islam (PPP dan PKS).
- b. Melatih penulis menganalisa usaha-usaha yang dilakukan partai politik Islam (PKB dan PKS) dalam meraih simpati masyarakat pemilih di D. I. Yogyakarta pada PEMILU 2009.
- c. Memperoleh jawaban atas penyebab ketidakmampuan Partai Persatuan Pembangunan (Partai Lama) dan kemampuan Partai Keadilan Sejahtera dalam meraih simpati masyarakat dalam mendongkrak perolehan suara masing-masing partai.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan :

Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam fokus kajian yang ada dalam penelitian terutama dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik terlebih menyangkut kemampuan PKS dan ketidakmampuan PPP dalam menarik simpati masyarakat dalam mendongkrak perolehan suara partai.

E. KERANGKA DASAR TEORI

1. Partai Politik

Terdapat beberapa definisi partai politik, antara lain :

- a. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggotanya, mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama. Kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁷
- b. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi.⁸
- c. Menurut Mark M. Hagopian
Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologi melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.

⁷ Pengantar Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988

⁸ Undang-undang No. 31/2002 penyempurnaan dari Undang-undang No. 2/1999

d. Menurut Raymod Girfield Gettel

Partai politik adalah *politica science* terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memaknai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.⁹

e. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.¹⁰

f. Soltou

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih. Bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.¹¹

g. Burke

Partai politik adalah sekumpulan orang-orang yang mempromosikan usaha-usaha mereka bersama-sama diletakkan atas sejumlah prinsip-

⁹ Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 111-112

¹⁰ Ibid : 112

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta , 1992 : 116

prinsip khususnya yang disetujui kesepakatan tersebut bisa sebagai ideologi garis-garis besar perjuangan program dan lain-lain.

Tugas dan Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam menjalankan perannya bagi pendidikan politik masyarakat secara optimal mempunyai tugas dan fungsi, antara lain :

Tugas Partai Politik antara lain:

- a. Tugas pokoknya untuk menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik menampung semua pendapat dan keinginan rakyat lalu memilih dan merumuskannya untuk diserahkan kepada pemerintah agar menjadi program politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
- b. Partai politik bertugas untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah
- c. Partai politik bertugas mendidik warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.
- d. Partai politik bertugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
- e. Partai politik bertugas untuk mencari dan mengajak serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu untuk ikut serta aktif dalam lapangan politik dan mendidik agar menjadi kader pemimpin.
- f. Partai politik bertugas mengatur perikaian, merumuskan konflik selanjutnya mengatasi dan mencari penyelesaiannya.

Fungsi Partai Politik antara lain:

- a. Fungsi utama adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
- b. Fungsi sosialisasi, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota melalui proses ini para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
- c. Fungsi rekrutmen, merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
- d. Fungsi Partisipasi politik, merupakan kegiatan warga negara (mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik atas suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin, memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
- e. Pemandu kegiatan merupakan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum lalu diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

- f. Komunikasi politik, merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dari masyarakat kepada pemerintah.
- g. Pengendalian konflik, merupakan lembaga yang mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- h. Fungsi kontrol politik, merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap adeal dan baik yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk meluruskan kebijakan atau pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.¹²

Selain itu terdapat juga fungsi partai politik menurut Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Pemilihan umum :¹³

- a. Melaksanakan penilaian politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta , 1992, hal 117-121

¹³ Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar*, Yayasan Kajian Dan Layanan Informasi Untuk Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Hal 71-72

- b. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat.
- c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik merupakan pengklarifikasi berbagai politik berdasarkan kriteria tertentu, antara lain :

- a. Berdasarkan asas dan orientasinya, terbagi menjadi 3 tipe yaitu :
 - 1) Partai politik pragmatis ialah partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat, kaku pada satu doktrin dan ideologi tertentu.
 - 2) Partai politik doktriner ialah partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideologi.
 - 3) Partai politik kepentingan ialah partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.
- b. Berdasarkan komposisi fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Partai massa (lindungan), yaitu partai politik yang hanya mengandalkan kekuatan massa pada keunggulan jumlah anggotanya dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya,

mengembangkan diri sebagai pelindung bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dimobilisasi untuk dapat memenangkan pemilu dan mendukung berbagai kebijakan tertentu.

2) Partai kader yaitu partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif serta penengakkan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasinya sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

c. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, menurut Almond dan Powell terbagi menjadi :

1) Berdasarkan basis sosialnya, partai politik terbagi menjadi:

a) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti keatas, menengah dan kebawah.

b) Partai politik yang beranggotakan kalangan kelompok kepentingan seperti buruh, petani dan pengusaha.

c) Partai politik yang beranggotakan pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik dan Hindu.

d) Partai Politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

2) Berdasarkan tujuannya, partai politik terbagi :

- a) Partai politik perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
- b) Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan persatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
- c) Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah penyampaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

2. Partai Politik Islam

Ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-'Azhim, Juz I, hal. 478 menyimpulkan Partai politik Islam adalah partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Partai politik Islam tidak ditujukan untuk meraih suara dalam Pemilu atau berjuang meraih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem Sekular menjadi sistem yang diatur oleh syariah Islam. Orang-orang, ikatan antara mereka hingga terorganisir menjadi satu kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama semuanya haruslah didasarkan dan bersumber dari Islam. Karenanya, partai Islam yang ideologis memiliki beberapa karakter, di antaranya:

1. Dasarnya adalah Islam. Hidup matinya adalah untuk Islam.
2. Orang-orangnya adalah orang-orang yang berkepribadian Islam. Mereka berpikir berdasarkan Islam dan berbuat berdasarkan Islam. Partai politik Islam terus menerus melakukan pembinaan kepada para anggotanya hingga mereka memiliki kepribadian Islam sekaligus memiliki pemikiran, perasaan, pendapat dan keyakinan yang sama, sehingga orientasi, nilai, cita-cita dan tujuannya pun sama. Merekapun menjadi sumberdaya manusia (SDM) yang siap untuk menerapkan syariah Islam. Pada saat yang sama, ikatan yang menyatukan mereka bukan kepentingan atau uang melainkan akidah Islamiyah.
3. Memiliki amir/pemimpin partai yang menyatu dengan pemikiran Islam dan dipatuhi selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, “Jika kalian bertiga dalam satu safar, tunjuklah amir satu di antaramu” (HR Muslim).
4. Memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas terkait berbagai hal. Partai Islam haruslah memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem pendidikan, politik luar negeri, dll. Semuanya harus tersedia dan siap untuk disampaikan. Konsepsi inilah yang disosialisasikan kepada masyarakat hingga mereka menjadikan penerapan semua sistem Islam tersebut sebagai kebutuhan bersama. Syariah Islam inilah yang diperjuangkan untuk ditegakkan. Pada sisi lain, konsepsi tidak akan dapat dilakukan kecuali adanya metode pelaksanaan (thariqah). Dan metode pelaksanaan hukum Islam tersebut

adalah melalui pemerintah yang menerapkan Islam. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menerapkan hukum Islam (khilafah) tersebut merupakan arah yang dituju partai Islam.

5. Mengikuti metode yang jelas dalam perjuangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, melakukan pembinaan dan pengkaderan. Kedua, bergerak dan bergaul bersama dengan masyarakat. Ketiga, menegakkan syariah secara total dengan dukungan dan bersama dengan rakyat.

6. Melakukan aktivitas:

a. Membangun tubuh partai dengan melakukan pembinaan secara intensif sehingga menyakini ide-ide yang diadopsi oleh partai.

b. Membina umat dengan Islam dan pemikiran, ide serta hukum syara' yang diadopsi oleh partai, sehingga tercipta opini tentang syari'at Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah umat dan keharusan menerapkan syariah Islam dalam wadah Khilafah.

c. Melakukan perang pemikiran dengan semua ide, pemikiran, aturan yang bertentangan dengan Islam.

d. Melakukan koreksi terhadap penguasa yang tidak menerapkan Islam atau menzalimi rakyat.

e. Perjuangan politik melawan negara kafir penjajah dan para penguasa yang zhalim.

Arah Jalan

Secara umum ada dua jalan yang ditempuh dalam perjuangan merubah sistem Sekular menjadi Islam. Pertama, jalan parlemen. Jalan ini menggunakan logika linier, yaitu partai politik ikut dalam parlemen untuk merumuskan perundang-undangan yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, sistem akan berubah.

Fakta menunjukkan perubahan total tidak pernah terjadi melalui jalan parlemen. Kalaupun bisa terjadi bersifat parsial. Karenanya, perjuangan melalui parlemen bukanlah metode untuk melakukan perubahan total.

Parlemen tidak dapat dijadikan sebagai metode perubahan. Sebab, metode perubahan melalui parlemen hanya bersifat teoritis belaka bukan praktis. Selain itu, pemilu bukanlah metode perubahan yang telah ditempuh oleh Rasul saw. ketika mendirikan pemerintahan Islam. Selain itu, fakta di Indonesia juga menunjukkan bahwa partai-partai politik dan anggota parlemen sejak awal telah melihat keharusan mereka untuk terikat dengan Sekularisme Kapitalisme beserta produk perundangan-undangannya. Ini artinya, pemilu di Indonesia tidak diadakan dalam rangka melakukan perubahan mendasar apapun.

Pada sisi lain dilihat dari faktanya, parlemen itu memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Membuat undang-undang dasar dan undang-undang serta mengesahkan berbagai kesepakatan, rancangan undang-undang, dan berbagai perjanjian yang lain.

2. Mengangkat kepala negara di beberapa negara, dia dipilih secara langsung oleh rakyat dan memberikan mandat kepadanya untuk menjalankan pemerintahan.
3. Melakukan pengawasan, koreksi, dan kontrol kepada pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam prakteknya, partai Islam tidak lepas dari langkah-langkah berikut:

1. Dimulai dengan pembentukan kader yang berkepribadian Islam (Syakhshiyah Islamiyyah), melalui pembinaan intensif (halqah murakkazah) dengan materi dan metode tertentu. Proses ini akan menjadikan rekrutmen kader politik tidak pernah surut. Bukan kader yang berambisi untuk mendapatkan kursi melainkan kader perjuangan dalam menegakkan Islam demi kemaslahatan manusia.
2. Pembinaan umat (tatsqif jama'iy) untuk terbentuknya kesadaran masyarakat (al-wa'yu al-am) tentang Islam.
3. Pembentukan kekuatan politik melalui pembesaran tubuh partai (tanmiyat al-jismi al-hizb) agar kegiatan pengkaderan dan pembinaan umum dapat dilakukan dengan lebih intensif, hingga terbentuk kekuatan politik (al-quwwatu al-siyasiya). Kekuatan politik adalah kekuatan umat yang memiliki kesadaran politik Islam (al-wa'yu al-siyasiy al-islamiy), yakni kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan syariah Islam. Maka harus ada upaya terus menerus penyadaran politik Islam kepada masyarakat, yang dilakukan oleh kader. Makin banyak

kader, makin cepat kesadaran terbentuk sehingga kekuatan politik juga makin cepat terwujud. Di sinilah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat terjadi. Apa yang menjadi kepentingan rakyat tersebut tidak lepas dari tuntutan dan tuntunan aturan Islam. Dengan cara seperti ini terjadi komunikasi politik dan sosialisasi politik antara partai dengan rakyat hingga massa umat memiliki kesadaran politik.

Pemikiran partai Islam tentu berbeda dengan partai Sekular-Kapitalis Liberal maupun Sosialis-Komunis. Sebagai contoh, dalam masalah ekonomi, partai sekular menjadikan seluruh aset produksi, termasuk sumber daya alam (SDA) dibiarkan dikuasai oleh individu atau swasta berdasarkan mekanisme pasar. Sementara partai Sosialis menjadikan negara sebagai aktor tunggal aktivitas ekonomi, sehingga semua aset produksi, termasuk sumber daya alam (SDA) dimonopoli oleh negara. Rakyat pun tidak boleh memiliki aset produksi apapun. Adapun partai Islam, menjadikan aset produksi, termasuk sumber daya alam (SDA), sesuai dengan mekanisme hukum syara', yang terbagi dalam tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Ada juga partai yang tidak memiliki konsep apapun tentang masalah tersebut, maka senyatanya ia bukanlah partai, atau sekadar partai papan nama.

4. Massa umat yang memiliki kesadaran politik menuntut perubahan ke arah Islam. Di sinilah penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan perumusan kepentingan (interest articulation) dilandaskan pada Islam dan diperjuangkan bersama antara partai dengan rakyat.

5. Penyampaian Islam pun ditujukan kepada ahl-quwwah dan pihak-pihak yang berpengaruh seperti politisi, orang kaya, tokoh masyarakat, media massa dan sebagainya. Melalui pendekatan intensif ahl-quwwah setuju dan mendukung perjuangan partai bersama rakyat. Kekuatan politik yang didukung oleh berbagai pihak semacam ini tidak akan terbendung.
6. Sistem (syariah) dan kekuasaan (khilafah atau penyatuan ke dalam khilafah) Islam tegak melalui jalan umat.¹⁴

3. Pemasaran Politik (Political Marketing)

Political Marketing (selanjutnya disebut Marketing Politik) adalah ilmu baru yang mencoba menggabungkan teori-teori marketing dalam kehidupan politik. Sebagai cabang ilmu, marketing politik memang bisa dikatakan masih bayi, tetapi kehadirannya telah menjadi trend dalam ranah politik di negara maju yang menganut demokrasi.¹⁵

Sementara di negara-negara berkembang, khususnya di Asia dan Afrika, marketing politik belum banyak dikenal luas baik dalam ranah praktek politik maupun kajian keilmuan. Walaupun sebagian besar negara di kedua benua ini telah menjalankan praktek demokrasi dan pemilu sistem multipartai yang kompetitif. Termasuk di negara Indonesia.¹⁶

¹⁴ <http://hizbut-tahrir.or.id>

¹⁵ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hal. 6; 21

¹⁶ Dari penelusuran literatur ilmiah, baik manual maupun berbasis internet, masih sedikit ditemukan kajian mengenai marketing politik yang dipublikasikan. Di Malaysia yang terlacak adalah (1) Masalina Ujang (2004), *Political Marketing: Is Market Orientation & Market Capabilities The Winning Formula? A Study on The 2004 General Election for The State of Pulau Pinang*. Pulau Pinang: MBA Dissertation Universiti Sains Malaysia, 2004; (2) Lim Hong Hai dan Ong Kian Ming (2006), "Electoral Campaigning in Malaysia" sebagai chapter dari buku Christian

Namun demikian, meskipun sampai saat ini penyelidikan dan publikasi yang membahas tentang marketing politik di negara Indonesia masih tergolong minim, bukan berarti selama ini aktivitas partai politik di masa lalu tidak melakukan aktivitas marketing politik. Disadari atau tidak partai politik di negara Indonesia telah melakukan serangkaian aktivitas ini. Di Indonesia misalnya, pengumpulan massa (temu kader, tabligh akbar dan deklarasi), pawai di jalan-jalan, liputan media cetak dan elektronik (TV, Koran, majalah, radio serta jejaring sosial) atas aktivitas sebuah partai politik sampai ke kunjungan wakil-wakil partai politik ke komunitas konstituen maupun komunitas tertentu telah biasa dilakukan.¹⁷

Hanya saja kalau dilihat dari intensitasnya, pelaksanaan marketing politik di Indonesia lebih bersifat sporadis pada saat pelaksanaan kampanye Pemilu saja. Padahal menurut Butler & Collins marketing politik tidak hanya dilihat selama periode kampanye Pemilu saja.¹⁸ Partai politik harus terus menerus memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setiap saat bukan hanya pada Kampanye Pemilu saja. Sebab model kampanye itu ada dua

Schafferer, *Election Campaigning in East And Southeast Asia: Globalization of Political Marketing*. Ashgate Publishing, Ltd, 2006. Hal. 55-79;; dan Che Supian Mohamad Nor et al (2006). "Political Marketing vs. Commercial Marketing: Something in Common for Gains" yang dipresentasikan dalam *6th Global Conference on Business & Economics* pada 15-17 Oktober 2006 di Gutman Conference Center, USA. Di Indonesia yang terlacak adalah (1) Adman Nursal (2004), *Political Marketing: Startegi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia.; (2) Firmanzah (2004), "Peran Ilmu Marketing dalam Dunia Politik: Menuju Marketing Politik di Indonesia", *Management Usahawan Indonesia*. No. 33 (1). Hal. 1-15; (3) Firmanzah (2005), "Menyoal Rasionalitas Pemilih: Antara Orientasi Ideologi dan 'Policy Problem Solving' ", *Management Usahawan Indonesia*. No. 34 (7). Hal. 8-16.; (4) Oman Heryaman (2007), "Memenangkan Pemilu dengan Political Marketing", *Makalah Presentasi* dalam Rapat Kerja Badan Pemenangan Pemilu PKS Kabupaten Bandung, 17 Februari 2007 dalam <http://digilib.unpas.ac.id>.; (5) Firmanzah (2007), *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; dan (6) Beberapa tulisan opini di media massa.

¹⁷ Firmansyah, *op.cit*. Hal. 18-19.

¹⁸ P. Butler & N. Collin, "Payment on Delivery: Recognising Constituency Service as Political Marketing. *European Journal of Marketing*. (35), 9-10, 2001. Hal. 1026-1037.

jenis. Pertama, kampanye pemilu yang bersifat jangka pendek dan biasanya dilakukan menjelang Pemilu. Kedua, kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus.

Pendapat ini didukung Fritzs Plasser dan Gunda Plasser,¹⁹ yang menyatakan telah terjadi pergeseran dalam bentuk kampanye dewasa ini, dari model kampanye modern ke mode kampanye pasca modern. Kampanye modern menggunakan "logika media" dan menempatkan pemilih sebagai audiens, sedangkan kampanye pasca modern menerapkan logika "pemasaran" yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian marketing politik tepat diterapkan dalam model kampanye politik.

Definisi pemasaran politik menurut Nursal yang pertama kali menerbitkan buku mengenai marketing politik di Indonesia, mendefinisikan sebagai serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Sehingga *political marketing* bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah secara umum mendukung dengan berbagai dimenasinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.²⁰

Definisi marketing menurut Bruce I Newman adalah proses memilih customer, menganalisa kebutuhan mereka dan kemudian mengembangkan inovasi produk, advertising, harga dan strategi distribusi dalam basis informasi. Marketing

¹⁹Fritzs Plasser dan Gunda Plasser, *Global Political Campaigning: A Worldwide Analysis of Campaign Professionals and Their Practices*. Greenwood Pub Group, 2002.

²⁰ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2004. Hal. 23-24.

dalam pengertian Bruce bukan dalam pengertian marketing biasa, melainkan produk politik berupa imeg politisi, platform, pesan politik dan lain-lain yang dikirim ke audiens yang diharapkan menjadi konsumen yang tepat.²¹

Dalam bukunya *Hand Book of Political Marketing*, Newman menambahkan dalam peta marketing kandidat (*Candidat Marketing Map*) paling tidak ada enam tahap yang harus diperhatikan diantaranya adalah :

a. Riset lingkungan (*environment research*)

Yakni seting dan konteks dimana seorang kandidat mengorganisasikan sebuah kampanye. Hal ini terkait dengan upaya mendefinisikan isu, peluang, dan tantangan yang dihadapi kandidat. Misalnya pada tahap ini meriset situasi ekonomi, *mood* pemilih (*voter satisfaction or dissatisfaction*), isu dan konsern penting pemilih, peta demografi pemilih, riset partai dominan atau independen dll.

b. Analisis penilaian internal dan eksternal (*internal and external assesment analysis*). Kandidat mesti menilai kekuatan dan kelemahan dirinya, kekuatan dan kelemahan organisasi kampanye pada seluruh tahapan pengembangan, status kandidat sebagai *incumbent* atau penantang, peluang isu-isu kampanye, kekuatan dan kelemahan kompetitor.

c. Marketing strategis (*strategic marketing*), misalnya terkait dengan segmentasi pemilih (usia, *income*, pendidikan, etnis, ideologi kelompok dll.), target dan *positioning* (citra kandidat versus citra lawan)

²¹ Newman, Bruce I and Perloff, Richard M, *Political Marketing : Theory, Research and Applications*, in Kaid, Lynda Lee, *Handbook of Political Communications Research*, (London : Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2004).

- d. Setting tujuan dan strategi kampanye (*goal setting and campaign strategy*) misalnya menyangkut *positioning* latarbelakang dan kualifikasi, pesan utama kampanye, pemilihan isu dan solusi konsep pribadi kandidat dll.
- e. Komunikasi, distribusi dan perencanaan organisasi (*communication, distribution and organization plan*). Tahap ini misalnya menekankan pada sosok penampilan, publisitas, iklan dan pemilihan pesan, format serta desain medianya. Termasuk penyiapan organisasinya misalnya saja, fundraiser and development staff, Issue and Research Staff, Media and Publicity Staff, Voulenteers and Party Workers dll.
- f. Pasar-pasar (massa) utama dan hasil (*key markets and outcomes*) yang terkait dengan segmen konstituen pemilih partai, segmen kontributor, segmen media dan publisitas.

Bagi partai-partai politik maupun kandidat, sekurang-kurangnya konsep marketing politik dapat dilakukan melalui beberapa metode:²²

- a. Mengkomunikasikan pesan dan gagasan.
- b. Mengembangkan identitas jati diri, kredibilitas dan tranparansi.
- c. Interaksi dan respons dengan komunitas internal dan eksternal dengan melakukan pencitraan partai politik.
- d. Menyediakan pelatihan, mengolah dan menganalisis data untuk kepentingan kampanye.

²² Paul Baines, Fritz Plasser & Christian Scheucher, "Operationalising Political Marketing: A Comparison of US and Western European Consultants and Managers". *Middlesex University Discussion Paper Series*, No. 7, July 1999.

- e. Secara terus menerus mempengaruhi dan mendorong komunitas untuk mendukung partai politik.

Ada empat hal utama yang melandasi pentingnya penggunaan marketing politik bagi partai-partai politik.²³

- a. terjadinya pergeseran paradigma pemilih dari ideologi ke program kerja.

Masyarakat cenderung menggantikan ikatan-ikatan ideologis (tradisional) dengan hal-hal yang lebih pragmatis, yaitu program kerja yang ditawarkan oleh kontestan. Masyarakat cenderung melihat apa yang bisa dan apa yang ditawarkan oleh partai politik maupun kontestan dibandingkan dengan alasan-alasan ideologis yang ada dibalik satu partai politik atau kontestan.

- b. meningkatnya pemilih non-partisan.

Kaum non-partisan melihat pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau program kerja partai politik mana yang dapat memberikan solusi atas permasalahan bangsa dan negara ketika program-program itu dikomunikasikan selama periode menjelang Pemilu.

- c. meningkatnya massa mengambang (*floating mass*).

Massa mengambang adalah kelompok masyarakat yang diperebutkan oleh partai-partai dan kandidat yang bersaing dalam Pemilu. Massa mengambang ini semakin besar seiring semakin kritisnya masyarakat.

²³ Firmansyah, *op.cit.* Hal. 57-58

d. Adanya persaingan politik

Sistem multipartai yang kini banyak dianut oleh negara yang sedang meniti ke arah demokrasi ataupun baru saja melaksanakan transisi dari otoriter menuju demokrasi, ditambah dengan semakin kritisnya masyarakat dalam memilih partai politik telah menempatkan partai politik pada iklim kompetisi yang ketat untuk memperebutkan pemilih. Dengan demikian partai politik atau kandidat semakin dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam melihat dan menganalisis permasalahan bangsa dan negara. Konsekuensinya, partai politik yang paling bagus dalam menyusun program kerjanya yang mempunyai peluang lebih besar untuk memenangkan Pemilu.

4. Manajemen Kampanye

Praktek manajemen dalam kegiatan kampanye sebenarnya bukanlah hal yang baru. Aktivitas kampanye selalu meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hanya saja dewasa ini setelah ilmuan dan praktisi komunikasi memiliki perhatian yang besar pada kajian kampanye, tahapn tersebut dilakukan dengan istilah manajemen kampanye.

Venus dalam bukunya *Manajemen Kampanye : Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, menyebutkan bahwa manajemen kampanye dapat dibedakan dalam tiga tahap:²⁴

²⁴ Venus, Antar, 2004, *Manajemen Kampanye : Strategi Memenagkan Pemilu*, Gramedia, Jakarta, 2004.

a. Perencanaan Kampanye

Supaya kampanye berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan merupakan sebuah keharusan. Gregory dan Simmons mengungkapkan lima alasan mengapa perencanaan harus dilakukan dalam sebuah kampanye, yaitu : memfokuskan usaha, mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang, meminimalisasi kegagalan, mengurangi konflik, dan memperlancar kerja sama dengan pihak lain. Perencanaan meliputi aspek : apa yang ingin dicapai, siapa yang akan menjadi sasaran, pesan apa yang ingin disampaikan, bagaimana menyampaikannya, dan bagaimana mengevaluasinya.

b. Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan kampanye merupakan penerapan konstruksi rancangan program yang telah dipersiapkan sebelumnya pada tahapan perencanaan. Karena itu, pelaksanaan harus konsisten berpedoman kepada rancangan yang ada tanpa pengabaian penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi dilapangan. Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahapan pelaksanaan kampanye adalah : merealisasikan unsur-unsur kampanye, menguji coba perencanaan kampanye, memantau pelaksanaan, dan membuat laporan kemajuan.

c. Evaluasi Kampanye

Evaluasi kampanye dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan kampanye. Definisi tersebut menunjukkan adanya dua aspek pokok yang

perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu : bagaimana kampanye dilaksanakan dan apa hasil yang dicapai dari pelaksanaan tersebut.

5. Pemimpin

Ada beberapa pendapat ahli tentang pemimpin dan kepemimpinan, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Maccoby, Pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius, dalam artian menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif, kendatipun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang berlainan.
- b. Sedangkan menurut Pancasila, Pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah :
 - 1) Ing Ngarsa Sung Tuladha : Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang – orang yang dipimpinnya.
 - 2) Ing Madya Mangun Karsa : Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang – orang yang dibimbingnya.

- 3) Tut Wuri Handayani : Pemimpin harus mampu mendorong orang – orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggungjawab.

Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu :

- 1) Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya.
- 2) Fungsi sebagai Top Manajemen, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dsb.

Menurut Kurt Lewin yang dikutip oleh Maman Ukas dalam suatu organisasi ada beberapa tipe-tipe pemimpin yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan organisasi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tipe Otokratik

Seorang pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan otokratik dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Hal ini dilihat dari sifatnya dalam menjalankan kepemimpinannya sangat egois dan otoriter, sehingga kesan yang dimunculkan dalam karakter tipe kepemimpinan ini selalu menonjolkan “keakuannya”.

2) Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin paternalistik ini bersifat kebapaan yang mengembangkan sikap kebersamaan. Salah satu ciri utamanya sebagaimana yang digambarkan masyarakat tradisional yaitu rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini menunjukkan ketauladan dan menjadi panutan di masyarakat. Biasanya tipe seperti ini dimiliki oleh tokoh-tokoh adat, para ulama dan guru.

3) Tipe Kharismatik

Karakteristik yang khas dari tipe ini yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.

4) Tipe Laissez Faire

Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi.

5) Tipe Demokratik

Pemimpin yang demokratik biasanya memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Seorang pemimpin demokratik disegani bukannya ditakuti²⁵.

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual adalah penjelasan atas batasan-batasan antara konsep satu dengan konsep lain yang dipergunakan dalam sebuah penelitian agar dalam penelitian tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan-batasan istilah yang ada dalam pokok masalah penelitian. Definisi konsep dipergunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang tertera dalam judul, adapun batasan-batasan dari penelitian ini, antara lain:

1. *Partai Politik*

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki kepentingan yang sama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam ruang lingkup lokalitas, biasanya melalui pemilihan umum.

2. *Partai Politik Islam*

partai politik Islam khususnya di Indonesia, adalah partai yang menggunakan label Islam (nama, prinsip, dan simbol), atau tidak menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama

²⁵http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67270:idealnya-pemimpin-dalam-suatu-organisasi&catid=68:features&Itemid=159

untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk Indonesia, tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam.²⁶

3. Pemilu

Mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya atau proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

G. INDIKATOR PENELITIAN

Indikator-indikator yang digunakan penulis untuk mengetahui perolehan suara masing-masing partai politik adalah :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada PEMILU tahun 2009 di D. I. Yogyakarta.
 - a. Pemasaran Politik
 - b. Manajemen Kampanye
 - c. Konflik
 - d. Tokoh Kepemimpinan

²⁶ Arsekal Salim, *Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara*(Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1999) hlm. 8.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada PEMILU tahun 2009 di D. I. Yogyakarta.
 - a. Pemasaran Politik
 - b. Manajemen Marketing
 - c. Loyalitas Kader

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian dengan taraf pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau arsip-arsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. Penelitian ini merupakan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan–perpustakaan yang memiliki referensi yang relevan.

1. Jenis Dan Metode Penelitian

Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis dan metode kualitatif. Jenis dan metode ini dipakai karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang penurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2009 .

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif,²⁷ penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak

²⁷ Tatang M Arifin, Menyusun rencana Penelitian, CV Rajawali, 1986, hal. 24

menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

Metode Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian deskriptif adalah suatu metode didalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.²⁸

Lebih lanjut menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini penulis tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

²⁸ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal 63

Dalam melakukan penelitian, penulis tidak saja tereksprei secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan. Dengan demikian penulis akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi.

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Jenis Unit Analisis

Unit analisa data adalah satuan terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian. Unit analisa data berisi penegasan tentang unit atau kesatuan yang menjadi subyek atau obyek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisisnya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera dalam perolehan suara pada pemilu 2009.

Dari beberapa kajian yang pernah ada, partai Islam di Indonesia bisa dibedakan dari asas politiknya dan atau basis massa politiknya. Partai politik Islam di Indonesia, adalah partai yang menggunakan label Islam (nama,

prinsip, dan simbol), atau tidak menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk Indonesia, tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam .

Berdasarkan definisi dan kategori yang dibuat Arsekal Salim di atas, maka yang termasuk partai Islam kategori pertama adalah :

a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai Islam yang berazaskan dan memegang teguh ideologi Islam. Partai ini menggunakan logo Islam yaitu Ka'bah. Partai ini basis massanya hanya pada kalangan umat Islam. Partai Persatuan Pembangunan memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kepentingan umat islam, dengan kata lain tidak universal.

b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik islam yang berazaskan dan ideologi Islam. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai dakwah dan partai kader. PKS bisa dikategorikan Islamis. memosisikan Islam bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara.

3. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana verifikasi

empiris dalam kegiatan penelitian, adapun jenis-jenis data yang dipergunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh dari responden melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun pihak tersebut adalah berasal dari partai-partai dalam hal ini pengurus partai PPP dan PKS.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data yang diperoleh adalah dari literatur yang berupa kutipan dari media massa, buku-buku, internet, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan tujuan agar data-data yang dikumpulkan lebih relevan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini tidak membutuhkan data primer yang diperoleh secara langsung dari manusia atau responden, sedangkan data sekunder yang bersumberkan pada dokumentasi.

a. Wawancara/interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara, berkomunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden yaitu, berasal dari partai-partai dalam hal ini pengurus partai PPP dan PKS. Nama-nama responden yang berasal dari pengurus masing-masing partai tersebut adalah :

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Wakil. Sekretaris. DPW.PPP.DIY : Drs. Ma'sum Amrullah

2) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Wakil Sekertaris III Bidang Informasi DPW PKS DIY : Mohammad Ilyas Sunnah

Sementara itu Koentjaraningrat memberikan definisi wawancara sebagai berikut :

Sebagai proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Metode interview atau wawancara mencakup yang mempergunakan kalau seseorang tujuan tertentu mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.²⁹

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku catatan-catatan, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian. Melalui teknik dokumentasi akan diamati fenomena dari obyek

²⁹ Koentjaraningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta. Hal; 162

yang diteliti, dari berbagai dokumen yang ada. Sartono menjelaskan bahwa dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus, biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan, dan dimana. Jawaban disusun secara konfigurasi yang khas dan memuat fakta yang menyatakan secara deskriptif.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori guna memperoleh kesimpulan. Selanjutnya gejala yang ada dianalisis menggunakan makna yang bersifat menyeluruh. Dalam analisis kualitatif data yang diperoleh berupa, gambaran dan bukan angka-angka, sehingga dalam hasil laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data, data-data tersebut diperoleh dari, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

Menurut Winarno Surachmad, penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.³¹

³⁰ Sartono Kartodirjo, 1990. *Metodelogi penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta. Hal. 63-64

³¹ Winarno Surakhmad, *Dasar- Dasar Teknik Research*, Transito, Bandung, 1978, hal 26